



**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA I**

Jl. Wijaya I No. 59 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan DKI Jakarta. 12170

Nomor : Um 0102/Pb6/83.1

Jakarta, 30 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft  
RP3KP Kabupaten Serang.

Yth.

**Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang**

di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang Nomor 600.2/34/DPRKP/2025 Tanggal 19 Juni 2025 Perihal Penyampaian NA dan Draft RP3KP, bersama ini kami sampaikan beberapa masukan pada Draft Raperda tersebut (sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan atas, perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pelaksana  
Penyediaan Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Jawa I,



**Elias Wijaya Panggapean, S.T., M.T.**

NIP. 19780828 200502 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
2. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan.

**LAMPIRAN**

Nomor : UM 0102/266/83./

Tanggal : 30 Juni 2025

Hal : Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft RP3KP Kabupaten Serang

No	Draft	Masukan	Alasan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)	<u><b>Diganti dengan</b></u> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6634)	Telah 2x dilakukan perubahan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5285) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
2	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)	<u><b>Diganti dengan</b></u> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402)	Penyesuaian dasar hukum terbaru
3	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)	<u><b>Diganti dengan</b></u> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6624)	Penyesuaian dasar hukum terbaru

4	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490	Penambahan Tahun dan Nomor Berita Negara
5	Permenpera Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang	<u>Diganti dengan</u> Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan Kemennpera agar tidak disingkat</li> <li>- Penyesuaian dasar hukum baru</li> </ul>
6	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511	Penambahan Tahun dan Nomor Berita Negara
7	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785	Penambahan Tahun dan Nomor Berita Negara
8	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Dinyatakan tidak berlaku pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 84, butir c	Penyesuaian dasar hukum baru
9	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596	Penambahan Tahun dan Nomor Berita Negara
10	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	Berita Negara RI tahun 2023 Nomor 1006	Penambahan Tahun dan Nomor Berita Negara

11	Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;	Dihapus	Penulisan Kembali sama dengan Nomor urut 9
12	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102)	<b><u>Diganti dengan</u></b> Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Banten yang bertumbuk</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 139 Ayat 2</li> <li>- Penyesuaian dasar hukum baru</li> </ul>
13	Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 107);	<b><u>Diganti dengan</u></b> Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 107);	Penulisan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang bertumbuk
14		<b><u>Penambahan Bagian Baru (Bagian Sembilan) pada Bab IV</u></b> Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni	Usulan Masukan Terkait Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatah Daerah dari Kementeria Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor HK 0101-Dd/05 tanggal 17 Februari 2025 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

15	<p><b><u>Penambahan pada Bab V</u></b></p> <p>Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> <li>- Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</li> </ul> <p>Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024 Nomor 3015/KPTS/M/2024 Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 20224</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti di masing-masing daerah melalui Perda</p>
----	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Jl. KH. Brigjen Syam'un Telp. (0254) 200177 Serang

Serang, 19 Juni 2025

Nomor : 600.2/34/DPRKP/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar  
Hal : Penyampaian NA dan Draft RP3KP

Kepada Yth.

1. **Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia**
2. **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I**

di-

**Jakarta**

Dengan Hormat,

Dalam rangka pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Serang** tentang **Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025** pada masa **Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024–2025**, bersama ini kami sampaikan **Dokumen Naskah Akademis** dan **Draft Raperda** dimaksud.

Dokumen tersebut kami sampaikan agar menjadi bahan pertimbangan dalam memperoleh **arahan dan masukan** dari Bapak/Ibu guna mendukung kelancaran proses pembahasan Raperda RP3KP Kabupaten Serang.

Dokumen dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/3G0OxOO>

Untuk informasi lebih lanjut serta konfirmasi terkait pengiriman data, dapat menghubungi:  
**TB. M. Taufik Ramdhani – 0812-1090-7159**

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara oleh elektronik :  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Serang



**H. Okeu Oktaviana, S.T., M.Pd**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 197210081999011001



**Lampiran 1**

Dokumen dapat dibuka melalui barcode dibawah ini :

